

SUPERVISI DI KABUPATEN TUBABA, OMBUDSMAN: SUDAH SAATNYA PEMDA BERANI TERAPKAN PUBLIC VALUE

Selasa, 05 Oktober 2021 - Nungky Febrianawati

Tulang Bawang Barat (Tubaba) - Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf dan Tim Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Provinsi Lampung melakukan kunjungan supervisi pelayanan publik di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Senin (4/10/2021). Kunjungan diterima langsung oleh Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad, Asisten II dan III, Kepala Dinas DPMPPTSP, Kabag Organisasi dan sejumlah aparatur Pemda.

Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan Penilaian Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021. Pihak Ombudsman memastikan bahwa hasil survei yang telah dilakukan pada Juli 2021 lalu masih terselenggara dengan konsisten.

Supervisi mengambil tempat di DPMPPTSP Kabupaten Tubaba sebagai OPD dengan jumlah produk terbanyak yang menjadi objek penilaian pada Penilaian Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021.

"Setelah melakukan supervisi dan koordinasi dengan data tim perwakilan, diperoleh bahwa seluruh standar pelayanan masih terpenuhi sebagaimana kondisi pada saat dilakukan survei pada awal Juli lalu. Beberapa bahkan meningkat," ungkap Dadan.

"Saya menyampaikan kepada Pak Bupati dan jajaran Pemkab Tubaba bahwa untuk mengukur kualitas pelayanan di suatu pemerintah daerah, tidak bisa dilakukan hanya dengan pembandingan dari internal, misalnya dari penilaian tahun lalu. Butuh pembandingan dari pihak (pemerintah daerah lain). Itulah salah satu tujuan Penilaian Kepatuhan diselenggarakan," tegas Dadan.

Dadan juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah sepatutnya tidak lagi memiliki *mindset* pelayanan dengan teori *New Public Administration* (NPA) dimana pelayanan masih berorientasi pada penghasilan, sehingga pelayanan yang penting seringkali diartikan sebagai pelayanan yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun saat ini sudah beranjak pada teori *New Public Management* (NPM) yaitu bagaimana mewirauusahakan birokrasi bahkan sudah selangkahnya menuju pada *New Public Value* (NPV). Karena dengan mewirauusahakan birokrasi, kondisi pelayanan akan menjadi semakin baik dan secara otomatis akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, akan banyak nilai yang diperoleh dan kenaikan PAD akan menjadi salah satu dampak yang akan dirasakan dengan penerapan NPV.

Dalam diskusi, Kadis DPMPPTSP Tubaba Lukman melontarkan kalimat candaan, "Dulu Pemkab Tubaba disebut Pemda yang bukan-bukan, namun kini kami sudah bertransformasi dari kabupaten yang bukan-bukan menjadi kabupaten yang bukan main."

Menanggapi hal tersebut, Dadan menyampaikan harapan bahwa untuk menjadi kabupaten yang bukan main, sudah saatnya Pemkab Tubaba menerapkan NPV dalam pelayanan.

"Saya tegaskan, NPV adalah era baru pemerintahan jadi kita tidak lagi bicara standar melainkan bicara nilai dari pelayanan itu sendiri," tutupnya.